

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sugiyono. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung: Alfabeta Kriyantono, Rachmat. 2008. **Teknik Praktis Riset Komunikasi**. Jakarta:Kencana
- Muji Sutrisno, Hendar Putranto, **Teori-Teori Kebudayaan** (Yogyakarta: Kanisius,2005), hlm.146
- Hotma P. Sibuea, 2010, **Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik**, Erlangga, Jakarta, hlm.150.
- (Raco, "Metode Penelitian Kualitatif", Jakarta: Pt Grasindo, 2010, hlm. 77)
- Miriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, (Jakarta: PT Gramedia, 2008) Edisi Revisi Cet Ke- III, hlm. 408.
- Liky Faizal, "**Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah**", "Jurnal TAPIs, Vol. 7 No.13, Juli-Desember 2013, hlm. 6
- Hariande L. Bintang dan Ahmad Jamaan, "**Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Perda**", "Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 11, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 57.

Soewarno Handayani, 2007, **Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen**, (Jakarta, Gunung Agung, 2009) hal.143

Skripsi

Swadesta Aria Wasesa, Relasi Kuasa dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari, Skripsi, (Yogyakarta, 2013) Hal 16

Jurnal

PENYALAHGUNAAN JABATAN WALI KOTA BEKASI DALAM ANGGARAN (Studi Kasus Putusan Nomor 2547 K/Pid.sus/2011) Oleh : Sugeng Riyanto Program Magister Hukum Universitas Krisnadwipayana Hamzah, Andi. "Korupsi di Indonesia: masalah dan pemecahannya." (1991). Maukar, Fryner.

RIYANTO, Sugeng. PENYALAHGUNAAN JABATAN WALI KOTA BEKASI DALAM ANGGARAN (Studi Kasus Putusan Nomor 2547 K/Pid. sus/2011).

JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA, 2019, 9.2.

ARISKA ROMADHONI, FADILLAH. *Praktek Jual Beli Jabatan Dan Dampaknya Terhadap Birokrasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)*. 2022. PhD Thesis. Universitas Muhammadiyah Jember.

Internet

<https://www.bekasikota.go.id/pages/sejarah-kota-bekasi> (diakses pada jumat 20 Januari 2023 pukul 18.57 WIB)



Nama : Aldinda Putri Martin
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Maret 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Centex, Ciracas, Jakarta Timur
No. Hp : 087772455755
Email : Aldindaptr99@gmail.com
Pendidikan : SDN BATU AMPAR 03 PAGI
SMPN 188 JAKARTA
SMAS WIJAYA KUSUMA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Partai Golongan Karya Kota Bekasi 2020-2025

Nama	Bapak Machrul Falak Hermasyah, ST.		
Jabatan/Instansi	Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bekasi		
Hari/Tanggal	Kamis, 15 Desember 2022	Pukul	15.02

Pertanyaan:

1. Apakah terdapat hubungan relasi kuasa antara partai golkar dengan walikota beksi periode 2018-2022?

Gak ada, jadi disebut setelah diantarkan oleh partai bukan hanya partai golkar saja tetapi juga partai manapun sebagai kepala daerah sudah selesai sebenarnya, dia sebagai jabatan publik yang sudah punya peraturan sendiri, peraturan sendirinya itu apa? Tadi uu 23 tahun 2014, uu 5 2014 tentang ASN, uu no 13 tahun tentang peraturan daerah, PP, peraturan menteri, BKN, nomer 17 kalau gak salah tuh tentang manajemen ASN jadi terikat, jadi kalau relasi kuasa dengan partai sebenarnya secara hukum terpisahkan untuk mengelola pemerintahan daerah, jadi hubungan kuasa partai dengan kepala daerah itu beda jalur apalagi untuk perekrutan calon kepala dinas. Karena fungsinya kepala daerah ketika jadi kepala daerah pun saya akui kepala daerah itu harusnya mundur karena dia adalah pembina politik seluruh partai dia yang membimbing. Ketika dia sudah menjadi kepala daerah dia tidak bisa berbicara atas nama partai golkar. Ketika pakai baju walikota atau bupati jadi gak ada hubunganny.

2. Seperti apa mekanisme partai golkar merekrut anggota partainya?

Jawaban: Masyarakat bebas merekrut anggota partai di lingkungan dan rumah tangga jika ingin bergabung dengan partai politik. Masyarakat dapat mendatangi pengurus partai atau pengurus partai untuk mendapatkan bukti kepentingan masyarakat terhadap partai politik. Mereka memilih ketua Golkar tingkat desa di

muslur (musyawarah kecamatan yang ada sampai tingkat RW), yang merupakan langkah selanjutnya untuk menjadi pengurus di kepengurusan tingkat desa berdasarkan pokkar (kelompok kader). pendirian kelurahan dan pendidikan kelompok dan sayap partai Golkar, seperti kelompok MKGR, Kosgoro, AMPI, Al Hidayah, dll. Masalah terkait perekrutan diatur oleh anggaran dasar JUKLAK dan peraturan rumah tangga dalam format (dengan 5 anggota) mengikuti pemilihan ketua partai. Mengenai Musyarawah dan Musyawarah Partai Golkar, lihat Pasal 2 Tahun 2020. Pimpinan organisasi pendiri dan ketua tingkat kecamatan mengikuti musda tingkat kota.

3. Bagaimana pandangan saudara terkait penyalahgunaan kewenangan yang terjadi pada walikota bekasi periode 2018-2022?

Jawaban: Jadi apa yang telah diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi, peraturan pemerintah no 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Jadi ketika seseorang menjabat kepala daerah dia tidak melakukan aturan itu tidak melaksanakan apa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang dia salah kan ada seleksi jabatan ada pengumuman ada penilaian ada pendaftaran dari calon-calon mana yang diminati oleh pegawai-pegawai yang secara eselonnya kepangkatannya sudah mencukupi dia mendaftar setelah mendaftar dia seleksi kepala daerah bikin yang namanya tim bapejaka badan pengurus jabatan dan kepangkatan ada timnya dimulai dari seleksi itu dulu setelah itu diseleksi semua baru diumumkan nilainya berapa ada tiga besar baru kepala daerah yang meneruskan”

4. Menurut saudara apakah ada pengaruh yang membuat walikota bekasi ini menyalahgunaan kewenangannya?

Jawaban: Gak ada, ya kesalahan dia sendiri aja, keserakahan dia sendiri atau dia tudak patuh thd uu kalo partai tidak akan”

5. Menurut bapak/ibu apakah kasus penyalahgunaan kewenangan ini menimbulkan potensi konflik kepentingan? Saat ini maupun dimasa yang

akan datang.

Jawaban: Kepentingan masyarakat iya, penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya itu merugikan masyarakat konflik kepentingan ya kepentingan dia sendiri berarti ya mungkin dia dengan lawan politiknya atau apa saya gangerti, tapi secara umum kalo kita bicara tentang masyarakat ya merugikan masyarakat karena ada masyarakat yang mengajukan permohonan yang sama sesuai objeknya misalkan yang benar-bener jujur didalam pengajuannya hanya mengikuti SOP sampe ada didepan loket kemudian ditinggal lama jadinya garagra ada orang dateng lewat belakang kasih duit dah cepetin nih jadi yg rugikan masyarakat kalo terjadi oenyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan menurut saya adalah ya terganggu masyarakat.

6. Menurut bapak/ibu apakah kasus ini termasuk masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administratif yang terlalu berbelit-belit dibidang pelayanan publik?

Jawaban: Pelayanan publik Ada SOP nya, yang ditetapkan yang saya melihatnya bahwa kepala daerah ini ketika ada ruang untuk kompromi kepada sipemohon ijin dia bertemu itulah disitu ada ruang untuk bisa dikatakanlah korupsi maka dariitu sekarang ada sistem pelayanan tidak boleh ketemu ajtara pemohon dengan pejabat, itu sekarang gak boleh jemu misal saua mau ijin pengelolaan limbah itu saya daftarkan pr saya diloket lalu saya tinggal nnti 2ningg ditundak lanjuti apakah bisa selesai apa ada oeninjauan hadi sistem pelayanan publik sudah bagus dari aturan

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi

Nama	Bapak Ahmad Faisyal Hermawan, SE, MM		
Jabatan/Instansi	Anggota DPRD Kota Bekasi		
Hari/Tanggal	Senin, 26 Desember 2022	Pukul	10.00

Pertanyaan:

1. Seperti apa mekanisme dprd kota beksi dalam merekrut pegawai pemda?

Jawaban: Cara mereka merekrut kita bisa mengawasinya dan semua itu kan diatur sama peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kemendagri, jadi memang aturan bakunya ada dikemendagri tinggal pemda itu memilah peraturan-peraturan yang mereka mau lakukan. Misal, pengangkatan kepala dinas dll pihak dinas itu kan punya kementriannya masing-masing, secara umum diatur oleh kemendagri eselon yang harus segala sesuatunya baik misal pemerintah butuh ganti kepala dinas karna pensiun atau kosong karna tersangkut masalah hukum itu nanti mereka kasihtau kita ikuti prosesnya sampai spesifikasi yang ditentukan dll sampai akhirnya terpilih itu kita sifatnya hanya mengawasi dan menerima laporan dari pemerintah kalau dianggap sudah sesuai dengan kementerian yang mengatur itu ya sudah kita sifatnya hanya mengatahui karna secara prinsip pemerintah tidak perlu minta izin sama kita. Tapi secara etika karna kita ini sifat andil untuk mengawasi secara etika mereka harus memberi tembusan dan diskusi bareng sama kita tapi sifatnya hanya pemberitahuan saja ataupun bisa kasih masukan sifatnya hanya pertimbangan saja yang penting teknis pelaksanaan sesuai aturan.

2. Bagaimana proses pergantian dan promosi jabatan kepala dinas atau kepala biro?

Jawaban: Pemerintah nanti akan menginformasikan bahwa kami harus mengikuti prosedur sampai persyaratan ditetapkan, jika kepala dinas perlu diganti karena pensiun atau posisi kosong karena terlibat dalam proses hukum, dll. Pengawas hanya diizinkan untuk mengawasi dan menerima laporan dari pemerintah sampai kami benar-benar terpilih jika kementerian yang bertanggung jawab menganggap itu tepat, jadi kami ini memiliki sifat untuk hanya tahu karena, secara teori nya, pemerintah tidak membutuhkan persetujuan kami. Tapi secara moral, karena kami disini bertanggung jawab secara etis untuk memantau, mereka harus memberikan salinan dan mendiskusikannya dengan kami namun, ini hanya pemberitahuan atau kesempatan untuk masukan, dan itu hanya pertimbangan yang terpenting teknis pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang.

3. Bagaimana proses DPRD kota bekasi dalam melakukan fungsi pengawasan dalam proses perekrutan jabatan kepala dinas?

Jawaban: Pengawasan DPRD Kota Bekasi memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan administratif, seperti pembuatan Raperda baru, pembatalan proyek atau program. Tindakan hukum adalah langkah selanjutnya. Secara khusus, kami melimpahkan kewenangan penuh untuk tindak lanjut hukum ini kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta kepada pimpinan lembaga atau komisi layanan publik untuk daerah yang memiliki ombudsman atau komisi layanan publik. DPRD juga dapat melakukan tindakan politik sesuai dengan Pasal 43 UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa DPRD sesungguhnya memiliki hak hukum yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai metrik politik

untuk menilai efektivitas pemerintahan daerah. Bahkan keputusan politik tersebut dapat berdampak pada bagaimana penegakan hukum dilakukan.

4. Apa bentuk pengawasan DPRD dalam proses rekrutmen kepala dinas?

Jawaban: Bentuk pengawasan yang diberikan DPRD Kota Bekasi kepada pemerintah adalah pengawasan pada tahap perencanaan dan penyiapan prakarsa atau kebijakan, antara lain dengan memantau persiapan kerja, proyeksi keuangan, dan rencana penggunaan personel dan sumber daya lainnya oleh pemerintah Kota Bekasi. . Ada atau tidaknya saksi, tujuan dari pengawasan semacam ini adalah untuk menghentikan pelanggaran dan mengembalikannya ke kondisi semula. Caranya adalah dengan melakukan post-audit dengan memeriksa pelaksanaannya segera setelah dilaksanakan (inspeksi) dan meminta laporan bagaimana pelaksanaannya. pengawasan DPRD dalam pembahasan anggaran. Dalam pengantar ini disebutkan bahwa sangat diantisipasi DPRD untuk mengkaji setiap permintaan anggaran, khususnya dari penyedia layanan publik, dengan mempertimbangkan biaya, output, dan hasil dari setiap jenis layanan. Sangat diharapkan bahwa anggota DPRD akan mengawasi operasi mulai dari tahap perencanaan. keputusan eksekutif. Dari alokasi anggaran untuk layanan tersebut juga dapat ditentukan apakah pemerintah daerah akan menawarkan layanan publik yang memadai atau tidak kepada masyarakat. Selama pelayanan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, penting juga untuk memastikan bahwa pelayanan publik mematuhi standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat. Selain itu, pengawasan dapat berfokus pada bagaimana anggaran layanan publik dilaksanakan atau berapa lama peraturan akan

berlaku. Tujuannya adalah untuk menilai tujuan yang direncanakan selain untuk memastikan bahwa pelayanan publik berfungsi seperti yang diharapkan. Rekomendasi untuk mempertahankan, meningkatkan, atau meningkatkan kualitas layanan diharapkan berasal dari pengawasan.

5. Bagaimana proses DPRD kota bekasi dalam melakukan fungsi legislasi?

Jawaban: DPRD Kota Bekasi bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Menurut Pasal 78.6 UU Nomor 22 Tahun 2003 dan 42.3 UU Nomor 32 Tahun 2004 DPRD Kota Bekasi yang mempunyai peran pengawasan melakukan pengawasan terhadap peraturan Kepala Daerah dan meminta laporan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas Desentralisasi. Selain itu, juga berwenang meminta informasi kepada masyarakat, Badan Hukum, dan penyelenggara negara di lingkungan Bekasi.

6. Seberapa pentingnya fungsi pengawasan ini terhadap proses perekrutan jabatan pemerintah daerah?

Jawaban: Hal ini mempunyai arti penting baik bagi pemerintah daerah maupun bagi yang melakukan pengawasan, dilihat dari fungsi pengawasannya. Fungsi pengawasan berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah, memastikan bahwa rencana dan strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan

sasaran dilaksanakan. Tidak hanya itu, semua prosedur pengawasan harus menyebutkan UUD.

7. Apakah ada faktor penghambat kinerja DPRD dalam pengawasan proses rekrutmen jabatan kepala dinas kota bekasi? Kalau ada tolong dijelaskan faktor apa saja?

Jawaban: Ada beberapa kendala dan hambatan yang kita alami, yaitu kelemahan internal di DPRD termasuk kurangnya Sumber Daya Manusia, mengingat bekasi yang sangat luas daerahnya dengan penduduk yang sangat padat, juga keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Namun kalau untuk teknis kita tidak ada hambatan sama sekali.

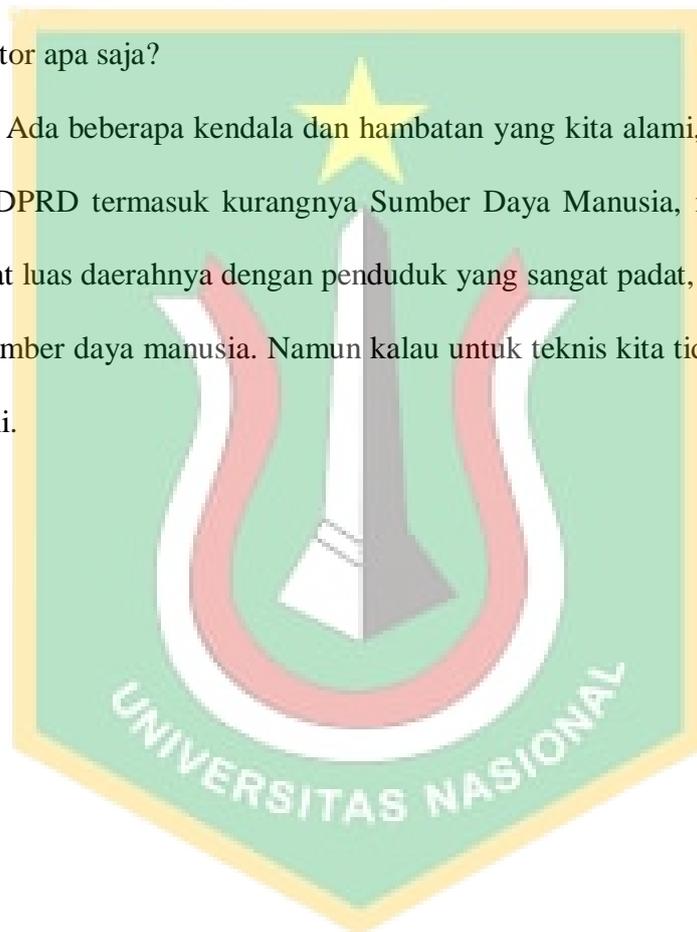
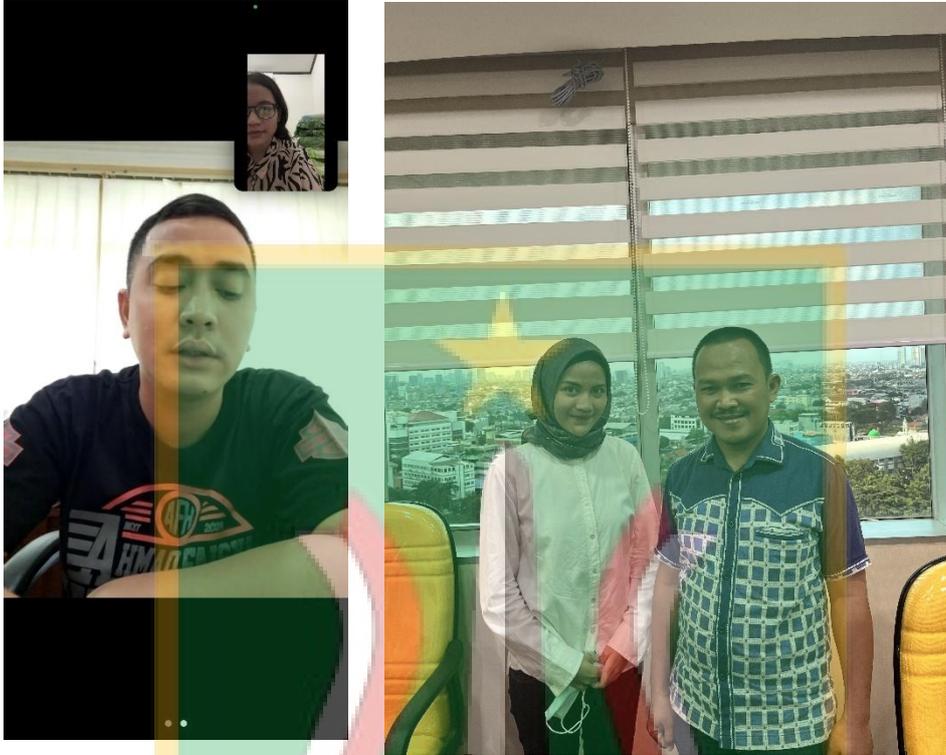


Foto Penelitian Lapangan



SKRIPSI ALDINDA

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Rank	Source	Percentage
1	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	3%
2	docobook.com Internet Source	2%
3	www.partaigolkar.com Internet Source	1%
4	mediasriwijaya.com Internet Source	1%
5	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
6	www.jogloabang.com Internet Source	1%
7	id.m.wikipedia.org Internet Source	1%
8	davidefendi.staff.umy.ac.id Internet Source	<1%
9	www.slideshare.net Internet Source	<1%